



Mkt+

BERBENAH PERKUAT PENERIMAAN

Penerimaan negara yang memadai diperlukan untuk menopang APBN yang sehat dan berkelanjutan. Pajak merupakan penopang utama penerimaan negara. Reformasi perpajakan sudah makin mendesak untuk menciptakan sistem pajak yang adil, sehat, dan efisien.

Daftar Isi

APBNKITA

04 Realisasi APBN 2021

DARI LAPANGAN BANTENG

05 Langkah Panjang Menuju Ideal

PHOTO STORY

06 India in Indonesia

LAPORAN UTAMA

08 Sinambung Pembinaan

Pilar Penerimaan

10 Perubahan Berkelanjutan

12 Infografik

WAWANCARA

16 Membangun Relasi dan
Berkolaborasi Sejak Dini

POTRET KANTOR

18 9 Langkah Membuat Rencana
Harta Waris

TEKA-TEKI

18 Teka Teki Juli Edisi Minggu Kedua

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pelindung: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. **Penanggung**

Jawab: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan

Layanan Informasi Rahayu Puspasari. **Pemimpin Redaksi:**

Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur**

Pelaksana: Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia A. **Dewan**

Redaksi: Ferry Gunawan, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi

Sulistyo, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam,

Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Budi Prayitno,

Budi Sulistyo. **Tim Redaksi:** Reni Saptati D.I, Rita Nurhayati,

Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra,

A. Wirananda, CS. Purwowidhu Widayanti, Rostamaji, Andi

Abdurrochim, Arif Miftahur Rozaq, Luqman Hakim, Muhammad

Irfan, Indah Sandary Putri Jayus, Kurnia Fitri Anidya, Buana

Budianto Putri, Mahardika Argha Mariska, Kurnia Fitri Anidya,

Muhamad Ripurio, Berliana, Ni Made Ary Ramayanti, Intan

Nur Shabrina **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya

Pratama, Andi Al Hakim, Andi Abdurrochim. **Desain Grafis**

dan Layout: Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska, Muhammad

Fithrah **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr.

Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst.

6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.



Foto *Cover* Resha Aditya

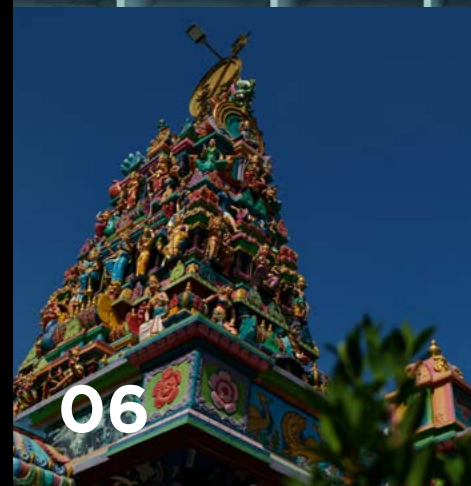
COVER STORY:

Pemerintah sedang merumuskan reformasi perpajakan agar sistem perpajakan di Indonesia lebih efisien dan efektif. Pada cover MK+ edisi ini, kami menggambarkan reformasi pajak sama seperti penyusunan mainan lego. Mainan lego yang berantakan dan tidak teratur disusun kembali agar menjadi lebih kokoh dan teratur.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.



08



06



12



18



20

Realisasi APBN 2021 (Per Mei 2021)

Pendapatan Negara

Rp726,4 triliun

Belanja Negara

Rp945,7 triliun

(Rp67,55) triliun

Keseimbangan Primer

(Rp219,3) triliun

Surplus/(Defisit)Anggaran

Pembiayaan Anggaran

Rp273,05 triliun

Perjalanan Panjang Menuju Ideal

Di masa pandemi seperti ini, semua orang pasti ingin sehat. Berbagai cara dan usaha pun ditempuh masyarakat untuk mempertahankan kesehatan mulai dari olahraga, makan makanan bergizi, mengonsumsi suplemen dan sebagainya. Semua upaya tersebut ditempuh agar kesehatan yang ideal dapat diraih. Pun berbagai macam strategi untuk mewujudkan sehat yang ideal tak akan pernah berhenti untuk diupayakan. Sama halnya impian untuk mencapai sehat yang ideal, pembenahan sistem perpajakan di Indonesia terus dilakukan hingga kini.

Sejarah mencatat penyempurnaan sistem perpajakan di Indonesia tak serta-merta terjadi. Ikhtiar ini sudah dirintis oleh Menteri Keuangan Ali Wardhana dari awal menjabat Menteri

Keuangan di sekitar tahun 1978. Pada tahun 1983, Menkeu Ali berhasil merampungkan sistem perpajakan baru yang lebih sederhana dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat. Tiga Rancangan Undang Undang (RUU) bidang perpajakan berhasil dirumuskan saat itu, yaitu RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), RUU Pajak Penghasilan (PPh), dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelahnya, reformasi perpajakan terus bergulir.

Masih belum idealnya perolehan penerimaan negara melalui sektor pajak terus mendorong pemerintah melakukan perbaikan di segala lini. Baru-baru ini pemerintah mengusulkan pembahasan bersama DPR RI mengenai RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Dengan diajukannya proposal perubahan UU tersebut, pemerintah

memandang reformasi perpajakan sudah makin mendesak untuk dilakukan agar sistem pajak yang adil, sehat, dan efisien dapat segera mewujudkan. Sehat dalam hal ini berarti efektif sebagai instrumen kebijakan, optimal sebagai sumber pendapatan, serta adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian. Sementara adil berarti memberi kepastian perlakuan pemajakan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antarkelompok pendapatan dan antarsektor. Materi revisi UU KUP yang disampaikan pemerintah melengkapi jalan panjang dan berbagai langkah reformasi yang telah dilakukan sebelumnya. Selamat membaca dan salam sehat!

Rahayu Puspasari

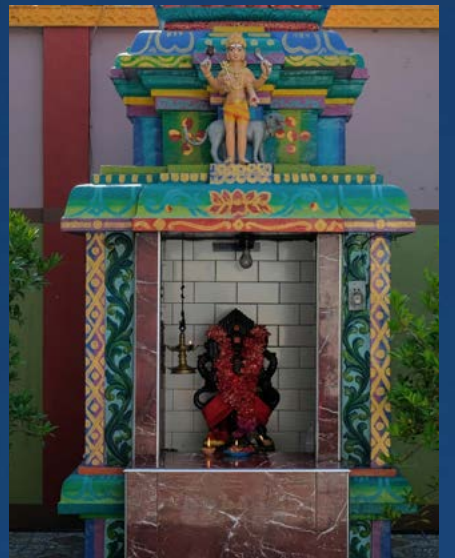
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Sekretariat Jenderal Kemenkeu

India in Indonesia

Teks & Foto Arief Kuswanadjie

Bagi yang belum kesampaian ke India, kalian dapat kesempatan mengunjungi *Little India* yang ada di Indonesia. Sebuah kawasan di tengah Kota Medan yang didominasi komunitas masyarakat India dan keturunannya. Di salah satu ujung jalan kawasan ini tedapat bangunan mirip candi dengan ornamen-ornamen unik berwarna *vibrant*. Siapa saja yang kali pertama melewati jalan tersebut pasti dibuat penasaran olehnya. Bangunan adiwarna itu bernama Shri Mariamman yang dibangun tahun 1884. Kuil Hindu ini adalah kuil tertua di Kota Medan.

Untuk mengobati rasa penasaran, pengunjung bisa masuk ke dalam kuil di jam yang telah ditentukan yakni pukul 6 pagi hingga 12 siang kemudian pukul 4 sore hingga 8 malam. Ketika hendak masuk kuil, pengunjung diwajibkan untuk melepaskan alas kakinya. Dari dalam kuil, kita bisa menemukan ornamen pahatan di temboknya dengan berbagai bentuk. Patung-patung kecil berukuran tidak lebih dari satu meter juga terlihat berdiri berjajar di atas tembok yang mengelilingi kuil.



Sinambung Pembenahan Pilar Penerimaan

Teks CS Purwowidhu Foto Resha Aditya

FORMULIR PERPAJAKAN



**PERSYARATAN
NPWP BADAN**

- FORMULIR PENDAFTARAN NPWP (TERSEDIA DI BAGIAN INFORMASI, ATAU DAPAT DIDOWNLOAD, DISTAMPLE DAN DITTO DIREKTUR)
- FOTOCOPY AKTA PENDIRIAN
- FOTOCOPY SKDU
- FOTOCOPY KTP-NPWP DIREKTUR
- SURAT KEABSAHAN DATA
- SURAT KUASA APABILA DIKUSAKAN (DITTO DIREKTUR, STAMPEL DAN DIBERI MATERI)
- FOTOCOPY KTP YANG DIKUSAKAN

PER-20/PJ/2013

Reformasi perpajakan sudah makin mendesak untuk menciptakan sistem pajak yang adil, sehat, dan efisien.

Penerimaan negara yang memadai diperlukan untuk menopang APBN yang sehat dan berkelanjutan. Pajak merupakan penopang utama penerimaan negara. Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara sebesar 65 persen. Partisipasi warga negara untuk membayar pajak dari waktu ke waktu meningkat tercermin dari bertambahnya Wajib Pajak (WP) terdaftar, dari 2,59 juta orang di tahun 2002, sekarang sudah mendekati 50 juta WP. Itu hanya satu dari sekian banyak hasil pembenahan sistem perpajakan yang dilakukan berkelanjutan sejak tahun 1983 hingga saat ini.

Pembenahan sistem perpajakan dari sisi kebijakan maupun administrasi terus berlanjut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR membahas revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Senin (28/6/2021) menyatakan reformasi perpajakan sudah makin mendesak untuk menciptakan sistem pajak yang adil, sehat, dan efisien. Sehat berarti efektif sebagai instrumen kebijakan, optimal sebagai sumber pendapatan, serta adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian. Adil berarti memberi kepastian perlakuan pemajakan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antarkelompok pendapatan dan antarsektor. Materi revisi UU KUP yang disampaikan pemerintah berusaha melengkapi berbagai langkah reformasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Jejak langkah pembenahan

Pada era 1983 WP mulai diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya atau disebut *self-assessment*. Pada masa itu berbagai sistem perpajakan rumit warisan Belanda pun diganti. Penerimaan pajak menjadi kontributor utama penerimaan negara, dari yang sebelumnya didominasi oleh penerimaan migas. Upaya pembenahan berlanjut. Pada periode 1991-2001 dilakukan amandemen terhadap beberapa undang-undang perpajakan yang berfokus pada

penyederhanaan jenis pajak. Pada 2002-2008 reformasi perpajakan difokuskan untuk membenahi tata kelola organisasi, SDM, dan proses bisnis perpajakan. Ribuan standar operasional disusun dan modernisasi kantor layanan pajak dilakukan dengan membentuk KPP WP Besar, KPP Khusus, KPP Madya dan KPP Pratama.

Pada 2008-2016 reformasi pajak berfokus pada peningkatan peran pajak sebagai respons atas krisis keuangan global. Pajak bukan hanya menjalankan fungsi penerimaan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi. Berbagai kebijakan insentif dan fasilitas perpajakan diterbitkan misalnya penurunan tarif untuk mendorong aktivitas dunia usaha dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk mendukung daya beli masyarakat. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan pertukaran data perpajakan untuk meningkatkan potensi dan kepatuhan pajak, serta dimulainya pembaruan sistem IT perpajakan juga dilakukan pada 2016-2017.

Pada 2020 hantaman keras pandemi COVID-19 mengakibatkan penerimaan perpajakan turun cukup dalam, berkurang -16,88 persen dari tahun 2019. Akibatnya rasio pajak pun turun menjadi 8,33 persen atau terendah dalam dua dekade terakhir. Penataan perpajakan pada 2020 difokuskan untuk mendorong perekonomian nasional melalui pemberian berbagai insentif perpajakan bagi sektor terdampak pandemi. Salah satunya penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20 persen mulai tahun pajak 2022. Sedangkan untuk meningkatkan penerimaan, ditempuh langkah perluasan basis pemajakan antara lain dengan memberlakukan pengenaan PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dijual kepada pelanggan



Sistem perpajakan kita perlu adaptif dengan tren ekonomi global yang berubah sangat cepat akibat perubahan pola bisnis di era digital.

domestik dan pengenaan bea materai untuk dokumen elektronik.

Pangkas *policy gap*

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar mengakui adanya perbaikan sistem perpajakan yang terus dilakukan pemerintah setiap tahunnya. Namun demikian, dia menilai implementasi sistem perpajakan di Indonesia masih belum optimal. Rasio pajak Indonesia masih terbilang rendah bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Dalam kurun 2018-2020 rasio pajak Indonesia stagnan di level 10-12 persen. Sedangkan Singapura 13-14

persen, Malaysia 12-15 persen, Filipina 17-18 persen, dan Thailand 17-17,5 persen.

Rendahnya rasio pajak ini menurut Fajry disebabkan 2 hal yaitu *compliance gap* dan *policy gap*. Namun ia menyayangkan, di Indonesia belum ada kajian empiris mengenai *compliance gap*. Sedangkan *policy gap* dapat dilihat melalui laporan belanja perpajakan, yang menunjukkan besarnya potensi penerimaan pajak yang tidak dipungut pemerintah karena regulasi. “Di tahun 2019, ada sebesar Rp257 triliun, besar banget, setara 1,62 persen dari PDB. Jadi besar banget belanja perpajakan kita, dan ini yang menyebabkan mengapa *tax*

ratio kita tertekan,” bebernya.

Di samping itu, Fajry juga melihat masih terdapat celah untuk melakukan penghindaran perpajakan. Dia mengungkapkan banyak pihak yang memecah entitas untuk menghindari menjadi pengusaha kena pajak (PKP) agar tidak memungut PPN atau agar objeknya tidak dikenakan PPN. Fajry mensinyalir ini terjadi karena ambang batas PKP Indonesia memang terlalu tinggi, bahkan di ASEAN merupakan salah satu tertinggi, kecuali Singapura. Itu juga yang menyebabkan rasio pajak kita rendah.

Fajry memandang rencana pemerintah menurunkan ambang batas

PKP tepat. Di satu sisi penerimaan akan naik. Di sisi lain, mereka dapat meningkatkan produktivitas usaha, kemudian menjadi perusahaan formal, selanjutnya akan mudah mencari pendanaan. Lalu akan mendorong *level playing field* dan persaingan yang sehat. Kemudian berujung pada tergenjotnya pertumbuhan ekonomi.

Di samping perlunya mengoptimalkan kinerja perpajakan, yang tidak kalah penting, menurut Fajry penataan sistem perpajakan harus dilanjutkan agar fungsi pajak dalam mendistribusi pendapatan untuk mengatasi ketimpangan dapat lebih maksimal.

Lanjutkan perbaikan

Untuk membenahi sistem perpajakan, Fajry memaparkan, yang pertama harus dilakukan adalah perbaikan struktural atau institusional. Misalnya, membangun *compliance risk management* atau mengelola kepatuhan berdasarkan risiko, sebagaimana yang tengah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini. Dia juga menekankan pentingnya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM DJP. “Kuantitas *account representative* (AR) per wajib pajak di Indonesia itu paling rendah dibandingkan banyak negara. Jadi satu AR pegang banyak WP, tentunya kan ini nggak akan efektif,” ujarnya.

Kedua, peningkatan kerja sama internasional. Sistem perpajakan kita perlu adaptif dengan tren ekonomi global yang berubah sangat cepat akibat perubahan pola bisnis di era digital. Kabar baiknya, OECD telah memutuskan konsensus global atas pajak digital. Konsensus pajak digital ini memungkinkan pemerintah menarik PPh perusahaan digital asing yang sudah mengambil manfaat ekonomi di Indonesia. Kebijakan ini akan berdampak positif bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Dan terakhir, pembenahan sistem perpajakan dilakukan dengan perbaikan *policy gap* melalui revisi peraturan perpajakan sebagaimana pembahasan yang tengah dilakukan pemerintah dengan DPR. Fajry menilai konsep reformasi perpajakan yang saat ini diusung pemerintah sudah tepat. “Reformasi ini bukan semata soal peningkatan kinerja penerimaan. Melainkan bicara mengenai keadilan, kepastian hukum bagi wajib pajak, dan pendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Perubahan Berkelanjutan

Teks Reni Saptati D.I Foto Istock

Hingar bingar persiapan kemerdekaan Indonesia sudah berlangsung sejak Maret 1945 melalui dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Para tokoh pendiri bangsa melaksanakan berbagai rapat untuk membahas segala hal yang dibutuhkan untuk kemerdekaan bangsa. Dalam salah satu rapat, sang Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat mengemukakan usulan agar pemungutan pajak diatur dengan hukum. Itulah awal mula pajak digagas sebagai sumber penerimaan negara untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Setelah Indonesia merdeka, perpajakan di Indonesia menggunakan sistem peninggalan kolonial Belanda. Bertahun-tahun kemudian, penyempurnaan sistem perpajakan baru dimulai. Pada tahun 1970, Menteri Keuangan Ali Wardhana mengubah

tarif pajak pendapatan supaya lebih adil. Ia pun memberi keringanan pajak penjualan, pajak perseroan, dan bea ekspor-impor. Namun, awal mula reformasi perpajakan besar-besaran terjadi pada tahun 1983 ketika Ali Wardhana berhasil menyelesaikan sistem perpajakan baru yang lebih sederhana dan meningkatkan peran serta masyarakat.

“Waktu awal 1983, reformasi yang menjadi *backbone* kita menerapkan *self assessment system*, mengenalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan membenahi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kita berubah. Itu revolusioner sekali,” jelas Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aarsal.

Reformasi perpajakan tak hanya berhenti di situ. Perubahan terus terjadi sehingga para punggawa pajak harus dapat beradaptasi. Krisis ekonomi 1998 menjadi titik tolak perubahan berikutnya. Perubahan tersebut terus berlanjut dari waktu ke waktu dan

Reformasi pajak berfokus pada dua hal, yakni reformasi kebijakan dan reformasi administrasi.

terbagi ke dalam beberapa periode yang kemudian dikenal sebagai Reformasi Pajak Jilid I (2002–2008), Reformasi Jilid II (2009–2014), serta Reformasi Jilid III (2016–2020).

“Pertanyaannya kemudian, kalau sudah sebanyak itu yang kita lakukan, kenapa masih perlu reformasi lagi? Ternyata masih banyak yang tersisa. Pertama, sistem pajak kita *equality*-nya belum *perfect*. Yang kedua, kita melihat PPN sebagai sistem yang berlaku saat ini masih banyak distorsi. Kemudian dari sisi pajak internasional, kita melihat tren ekonomi global berputar dengan sangat cepat. Ada perubahan pola bisnis, digital, dan ada komitmen antarnegara mengurangi *base erosion* dan *profit shifting*. Nah, tentu ini membutuhkan langkah-langkah baru lagi,” ungkap Yon panjang-lebar.

Yon menggarisbawahi, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kelanjutan dari reformasi yang sudah dilakukan selama ini. “Jadi, bukan ujung-ujug. Ini harus dilihat sebagai suatu gambar yang utuh mulai dari 1983 sampai dengan sekarang. Selalu ada benang-benang merahnya,” tegasnya.

Reformasi kebijakan dan administrasi

Tak perlu diragukan betapa besar dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan perpajakan. Yon menyatakan penerimaan pajak pada tahun 2020 turun hampir 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Capaian penerimaan pajak tahun 2020 tersebut memiliki level yang hampir sama dengan capaian pada tahun 2015.

“Sementara, dari sisi belanja kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ada pos belanja yang tadinya tidak ada di dalam budget, sekarang jadi harus ada, misalnya menyediakan vaksin yang nilainya puluhan triliun, insentif nakes selama pandemi, bantuan sosial di luar bantuan-bantuan yang sudah ada selama ini,” jelas Yon.

Pemerintah melebarkan defisit anggaran agar dapat memenuhi segala kebutuhan di masa pandemi. Namun, upaya untuk membangun kembali fondasi ekonomi Indonesia terus dilakukan, salah satunya dengan memperkuat penerimaan negara. Reformasi perpajakan adalah sebuah langkah penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Indonesia butuh anggaran yang besar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, terutama agar mampu mengembalikan defisit APBN menjadi kurang dari 3 persen pada tahun 2023.

Reformasi pajak, jelas Yon, berfokus pada dua hal, yakni reformasi kebijakan dan reformasi administrasi. Reformasi kebijakan meliputi berbagai upaya

dengan tujuan untuk memperluas wajib pajak. Pemberian insentif pajak dilakukan pada sektor bernilai tambah tinggi yang menyerap banyak tenaga kerja dan insentif pajak yang mengikuti dinamika global. Reformasi bidang ini juga diarahkan untuk membuat sistem pajak yang lebih adil.

Sementara itu, reformasi administrasi dilaksanakan dengan harapan dapat menciptakan administasi pajak yang sederhana dan efisien, mengikuti perkembangan struktur ekonomi digital dan transaksi ekonomi, mengikuti tren dan best practices perpajakan global, serta meningkatkan kepatuhan pajak.

Dalam acara peluncuran buku “Cerita di Balik Reformasi Perpajakan” pada 14 Juli 2021, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengakui bahwa sistem administrasi perpajakan memerlukan perbaikan dan perubahan. Ia menyatakan Ditjen Pajak perlu meningkatkan layanan ke Wajib Pajak (WP) karena dinamika disrupsi digital serta perkembangan dan transaksi ekonomi betul-betul sudah luar biasa.

“Dan mustahil, kita tidak mengikuti perkembangan jika kita mengharapkan penerimaan perpajakan meningkat. Ujungnya ada dua, kita melakukan perbaikan dengan harapan besar penerimaan pajak meningkat secara kuantitatif. Di sisi lain, kita harus memberikan layanan yang lebih baik kepada WP, sehingga *cost of compliance*-nya bisa diturunkan, dan kepatuhan WP akan meningkat,” terang Suryo.

Tetap optimalkan penerimaan

Meskipun aktivitas ekonomi melambat selama pandemi COVID-19 berlangsung, upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara di masa pandemi terus dilakukan. Ditjen Pajak menerapkan setidaknya tiga strategi utama. Pertama, memperluas

basis pajak. Strategi ini dilakukan dengan memperluas basis pemajakan orang pribadi, mengenakan pajak atas kekayaan, dan mengenakan pajak atas properti. Selain itu, Ditjen Pajak juga mengambil langkah memajaki transaksi digital, menaikkan tarif pajak tidak langsung, serta menerapkan pajak minimum alternatif.

Strategi kedua, meningkatkan administrasi perpajakan, yakni dengan mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak daring serta meningkatkan komunikasi dengan WP. Strategi ketiga, mendukung kerja sama perpajakan internasional, yakni berupa bantuan penagihan antarnegara dan pertukaran informasi.

Bagaimanapun, penerimaan pajak masih menjadi sumber utama pendapatan negara dalam APBN. Pemerintah telah menyiapkan reformasi perpajakan periode 2021-2024 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.

“Kita melihat dinamika global dan memang membutuhkan perhatian kita yang luar biasa dan menuntut kita untuk terus bergerak melakukan reformasi. Di sisi lain, kondisi pandemi menyebabkan kita juga harus berbenah. Berbenah ini yang kita sebut sebagai konsolidasi fiskal, kembali ke kondisi APBN yang sehat, salah satunya defisit dibuat di bawah 3 persen,” ujar Yon.

Ia menilai terdapat dua kunci utama untuk mencapai defisit di bawah 3 persen. Pertama, menerapkan *spending better* dalam belanja APBN. Kedua, mengoptimalkan penerimaan pajak. “Inilah yang mendorong kita untuk tetap melakukan reformasi pajak,” pungkasnya.

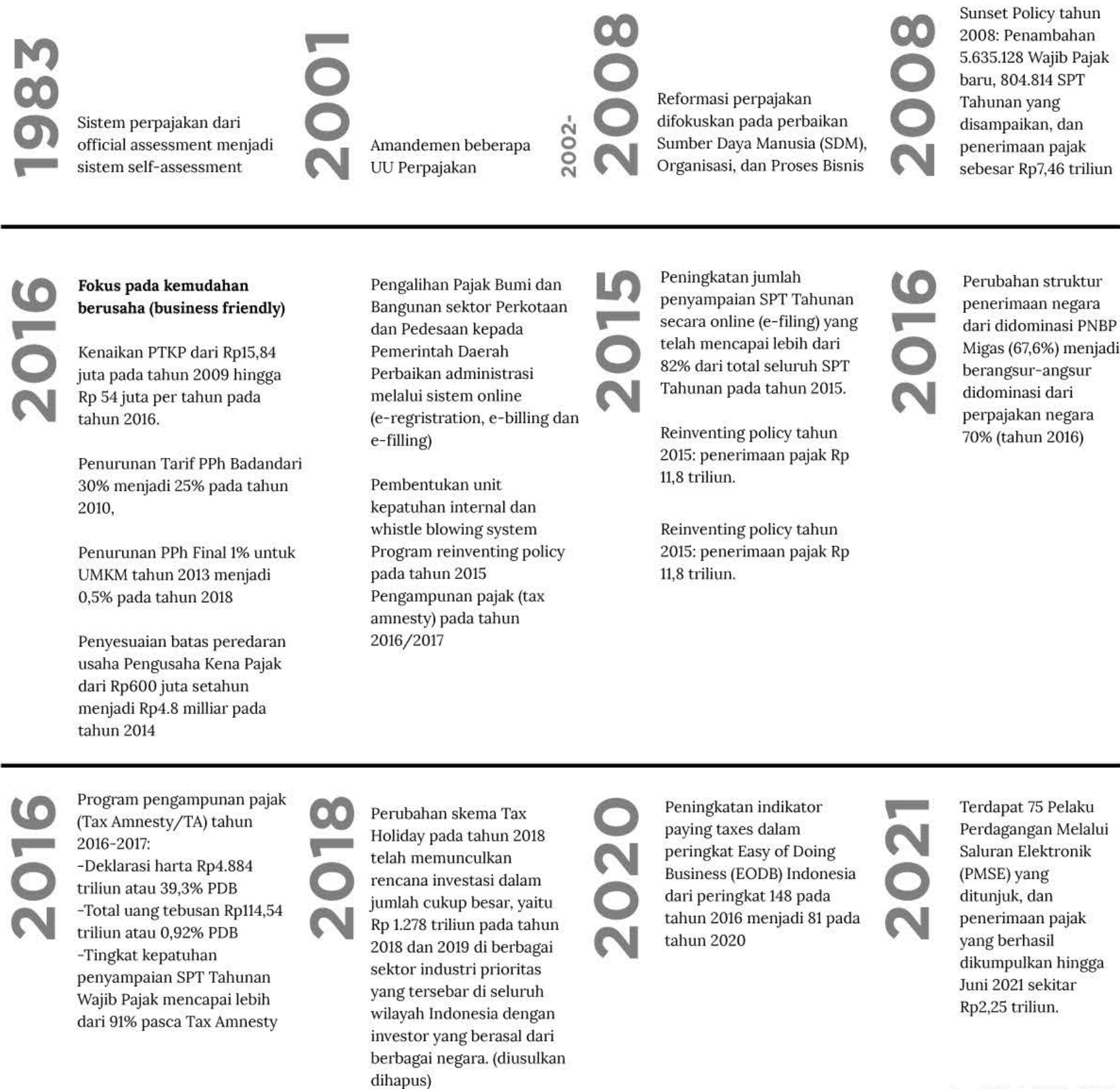


Kami Berbenah Buatmu ...

Perjalanan Panjang Reformasi Pajak

Penyempurnaan sistem perpajakan di Indonesia tak serta merta terjadi. Pelan-pelan, upaya ini sudah dirintis dari masa kepemimpinan Menteri Keuangan Ali Wardhana. Titik tolak reformasi perpajakan besar-besaran oleh Ali Wardhana sudah dirintis mulai 1978. Ali memperkenalkan asas pemungutan pajak self assessment pada sistem perpajakan yang baru, menggantikan asas official assessment. Kini reformasi dan perbaikan tata cara perpajakan terus berlanjut. Semua langkah tersebut dilakukan hingga kini dengan tujuan menciptakan sistem pajak yang adil, sehat, dan efisien.

Highlight capaian perjalanan panjang reformasi perpajakan



sumber: Pidato MK ke DPR

Membangun Relasi dan Berkolaborasi Sejak Dini

Teks Dimach Putra Foto Dok. Aparatur Muda

Generasi milenial dan Gen-Z mendominasi komposisi pegawai di kantor-kantor Kementerian dan Lembaga (K/L).

Mereka datang mengabdikan ilmu dan pengetahuannya ke sektor publik. Gear budaya dirasakan para aparatur muda ini ketika menyadari bahwa semangat mudanya harus disesuaikan dengan birokrasi pemerintahan yang masih berproses untuk terus bertransformasi.

Kami berbincang dengan Alwin Adityo, seorang pegawai Otoritas Jasa Keuangan, dan Friezca Rara Jura dari Kementerian Dalam Negeri. Keduanya adalah *Co-chair* Aparatur Muda. Bersama beberapa rekan aparatur lain, mereka membentuk komunitas bagi pegawai muda di lingkungan pemerintahan. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Aparatur Muda terbentuk?

Aparatur Muda terbentuk di tahun 2018. Dimulai dari kumpulan sekitar 30-40 pegawai muda dari berbagai K/L. Awal kami bisa berkumpul karena *word of mouth* saja. Contohnya, saya waktu itu mengenal seorang rekan dari Kementerian Keuangan yang kebetulan sering bertemu di rapat antar K/L. Dari obrolan kami, muncul ajakan untuk

membuat komunitas informal untuk sesama rekan aparatur. Saya setuju untuk bergabung. Kemudian, saya mengajak teman lain untuk ikut yang kemudian juga mengajak teman-temannya lagi dari berbagai K/L.

Awalnya kami membuat grup whatsapp untuk memudahkan komunikasi. Dari obrolan di grup tersebut, kami pun memutuskan membuat acara pertemuan perdana, kebetulan saat itu Ramadan jadi sekalian saja kami kemas sebagai buka bersama. Acara tersebut sekaligus menjadi *launching* komunitas Aparatur Muda secara resmi. Kami bersyukur ada teman dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang berkenan mengatur lokasi pertemuan di kantornya. Bahkan saat itu acara kami dibuka oleh Bapak Moeldoko.

Apa tujuan dibentuknya Aparatur Muda?

Sebagai wadah untuk komunikasi dan diskusi seputar kebijakan di K/L yang sedang in. Tujuannya untuk bisa saling mengenal kolega-kolega kami dari lintas K/L. Sebelum ada Aparatur Muda, kami hanya bertemu di forum-forum yang sangat formal dan lingkungan yang birokratis. Jika bertemu pun hanya bertukar nomor kontak untuk saling menanyakan bahan dan jadwal rapat. Tidak ada *social life*-nya.

Padahal sebagai generasi

muda, kita punya keinginan untuk menyampaikan pendapat dan bertukar ide. Mungkin sebagai masukan untuk sebuah kebijakan atau untuk tahu lebih banyak lagi tentang kebijakan tersebut. Sebagai pegawai yang masih berada di entry level, kami ingin tahu lebih banyak pekerjaan di K/L lain itu *gimana sih*? Harapannya bisa memperlancar komunikasi, semisal kita nanti menjadi *decision maker*.

Seperti apa sistem kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Aparatur Muda?

Dulu kami membentuk yang namanya *steering committee*, kemudian kami menyebutnya *task force*. Intinya, mereka ini adalah seksi sibuk di Aparatur Muda. Orang-orang ini adalah “kompas” yang membuat komunitas ini aktif. Personilnya sih *come and go* karena ada yang harus melanjutkan studi atau sedang sibuk pekerjaan dan urusan lain. Jumlahnya sekitar 20-an orang, untuk itu kami aktif melakukan rekrutmen tiap tahun menyesuaikan kebutuhan.

Acara yang kami buat cukup beragam. Kami sering mengadakan *casual discussion* dalam berbagai format. Kadang narasumbernya dari internal kami sendiri, atau biasa kami sebut *peer based learning*. Selain itu, kami juga biasa mengundang narasumber dari luar untuk *nge-lead*

Aparatur Muda

Selain berjejaring, ajang *casual discussion* dimanfaatkan oleh para Aparatur Muda ini untuk mengasah *critical thinking* mereka



Game night juga kerap diadakan untuk mengakrabkan hubungan.

sesi tersebut. Untuk narasumber eksternal ini kami mengundang para ahli dalam berbagai bidang, mulai dari instruktur yoga, ahli tata bahasa, pejabat publik, hingga profesor dari New York. Pandemi ini bisa dibilang juga membawa berkah, karena memudahkan kami dalam menyelenggarakan acara secara daring. Bahkan kami bisa menjangkau teman-teman aparatur di daerah hingga yang sedang bertugas di luar negeri.

Pernah mendiskusikan tantangan generasi muda yang bekerja di sektor publik, seperti apa?

Kalau dari saya pribadi, dalam penyampaian pendapat di lingkungan formal itu agak susah. Dalam rapat, kita biasanya hanya bisa *feeding opini* ke pimpinan masing-masing, kemudian mereka yang akan menyampaikan. Sehingga, mungkin opini kita jadi agak terpendam, tidak keluar dan tersampaikan ke pihak *counterpart* karena adanya *layer of bureaucracy* tersebut.

Ide kita jadi terhenti, tidak semudah itu untuk bisa sampai ke

level *decision maker*. Hal ini bisa jadi *men-discourage critical thinking* dari para generasi muda. Nah, di sini peran Aparatur Muda hadir. Sebagai wadah untuk bebas berbagi menyampaikan isi hati dan ide, tanpa melihat latar belakang instansinya atau level keahliannya.

Adakah saran untuk sesama pegawai muda agar dapat mengoptimalkan potensinya?

Gunakan waktu sebaik-baiknya di luar jam kantor untuk berjejaring dan mengembangkan potensi dan minat kita. Bukan berarti mengabaikan pekerjaan kita. Tugas utama kita tetap melakukan pekerjaan dari kantor dengan baik. Bagaimanapun kita adalah pegawai yang mencari nafkah dari pekerjaan di instansi masing-masing.

Tapi di luar itu, jangan sia-siakan waktu dan kemampuan kita. Caranya bisa dengan mengikuti *essay contest*, menulis opini di media, atau *sharing* dengan sesama. Optimalkan segala cara untuk menyalurkan aspirasi kita sebagai pegawai muda. Tentu harus

disampaikan dengan baik dan bijak. Bukan sekadar kritik saja, harus ada *constructive feedback*-nya.

Apa mimpi besar Aparatur Muda ke depan?

Saya menyadari sekarang telah banyak bermunculan komunitas yang mewadahi sesama pegawai pemerintahan muda. Harapannya bisa lebih banyak mengembangkan kolaborasi dan tidak malah menimbulkan sekat-sekat. Jangan ada lagi anggapan bahwa komunitas lain adalah rival, tetapi justru sebagai *partner kolaborasi*.

Berikutnya, kami terus berusaha untuk menjaring lebih banyak lagi pegawai muda untuk bisa berbagi pengalaman dan aspirasinya dalam forum informal. Saya yakin dengan membina jejaring dan hubungan yang baik dari dini, akan memudahkan kita kelak saat berada di level pembuat kebijakan. Kita sudah tahu siapa rekan yang kita butuhkan untuk berkolaborasi.

9 Langkah Membuat Rencana Harta Waris

Teks Value Foto iStock

Pengertian ‘warisan’ berasal dari kata serapan bahasa Arab yang diterjemahkan sebagai berpindahnya sesuatu (aset) dari seseorang ke orang lain. Yang sering menjadi masalah utama dalam persoalan harta waris adalah proses pembagian. Isu soal pembagian harta waris sebenarnya bisa diatasi apabila setiap pihak ahli waris memahami hukum yang berlaku dan menerimanya.

Di Indonesia, ada beberapa hukum waris yang dijadikan landasan seperti hukum waris agama, hukum waris adat, dan kitab UU hukum perdata. Ada beberapa alasan penting mengapa kamu perlu membuat rencana harta waris.

Pertama, menghindari tidak produktifnya aset. Contohnya, suami-istri meninggal dalam kecelakaan dan meninggalkan anak berusia lima tahun. Harta waris yang ditinggalkan berupa kendaraan, rumah, dan bisnis. Sayangnya, si anak ini belum bisa mengelolanya karena usia. Di sinilah rencana harta waris penting dibuat agar saat dia sudah cukup umur, aset tersebut tetap terkelola dengan baik.

Kedua, agar pembagian aset waris sesuai dan bermanfaat. Setiap anggota keluarga memiliki bagian masing-masing dalam hak harta waris. Sayangnya, ketentuan hukum sering kali tidak sesuai

dengan kondisi kita. Itulah mengapa harta waris harus diatur lebih baik lagi agar sesuai dengan keinginan. Pastikan aset yang dimiliki dan akan diwariskan bisa bermanfaat bagi penerimanya.

Ketiga, mencegah terjadinya konflik. Tak bisa dimungkiri masalah harta waris ini identik dengan konflik. Membuat rencana harta waris setidaknya bisa meminimalkan terjadinya konflik dalam keluarga. Nah, agar rencana harta waris bisa dibuat dengan tepat berikut langkah-langkah yang perlu kamu lakukan.

Menghitung *net worth*

Cara mudah menghitung *net worth* yaitu dengan menambahkan estimasi nilai dari aset-aset yang ada kemudian dikurangi dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan seperti utang, cicilan, kartu kredit, kredit pinjaman hingga KPR. Hasil pengurangan inilah *net worth* aset kamu. Lalu, cari tahu berapa besar pajak yang mesti dibayarkan.

Mengkaji kondisi keluarga

Banyak atau sedikit aset yang kamu miliki, kamu tetap perlu membuat rencana harta waris. Perencanaan yang baik akan mempersiapkan tak hanya dirimu namun juga keluarga atau kerabat yang mungkin akan terlibat

memang tak mudah bahkan rumit. Oleh karena itu, hubungi mereka yang sudah ahli di bidang ini untuk membantumu membuat pilihan rencana harta waris yang baik dan nantinya bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan.

Tentukan bentuk waris

Kamu perlu menentukan apakah nantinya kamu akan membuat surat harta waris sederhana (last will) atau dalam bentuk pemberian kepemilikan properti. Dengan bantuan jasa perencana waris yang profesional, kamu

akan mendapat petunjuk dan melihat pro-kontra dari dua bentuk surat wasiat tersebut.

Siapkan rencana waris untuk ketidakmampuan fisik dan mental. Kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam membuat rencana waris, pastikan kamu menyusun rencana jangka panjang bahkan untuk keadaan ketika kamu sudah tidak memiliki kemampuan baik fisik maupun mental. Jika hal ini tidak kamu persiapkan, aset yang kamu miliki bisa jadi berakhir dan diawasi oleh pihak

pengadilan.

Tentukan ahli waris

Dengan menyusun rencana harta waris, setidaknya kamu bisa mengamankan aset-aset untuk diberikan ke pihak yang tepat dan menghindari konflik. Tentukan ahli waris untuk aset yang kamu miliki dan tentukan berapa besar jumlah warisan yang akan diterima mereka nanti.

Tentukan orang kepercayaan untuk memegang surat waris

Pilihlah pihak yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan apa yang kamu inginkan dalam surat waris. Kamu bisa menunjuk pengacara, bankir, penasihat keuangan, agen perumahan, penasihat bisnis atau akuntan. Pastikan yang ditunjuk adalah pihak yang kredibel di bidangnya dan dapat bekerja secara profesional.

Tingkatkan rencana harta waris

Rencana waris yang ditingkatkan bertujuan untuk melindungi semua aset agar bisa terus dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Seringlah melakukan diskusi dengan pengacara untuk menyelesaikan rencana warismu.

Evaluasi dan perbarui rencana waris Evaluasi kembali rencana warismu setiap setahun sekali. Mengapa? Karena bisa saja asetmu bertambah atau anggota keluargamu bertambah dari pernikahan atau kelahiran. Teruslah update kembali rencana waris yang sudah kamu susun.

Memberikan yang terbaik bagi keluarga adalah hal yang diinginkan bagi setiap orang. Membuat rencana waris adalah salah satu cara mempersiapkan yang terbaik bagi orang-orang terkasih. Pikirkan harapan-harapan baik sebagai tujuan dari rencana harta waris ini sehingga kelak keluarga yang akan ditinggalkan bisa mendapat manfaat dan memperbesar bisnis yang kamu wariskan.





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

COMING
SOON

KEMENKEU DATA
HACKATHON⁺
2021

Start submission: 21 Juli 2021

HACKATON SLDK - HACKATON ASN
KELAS EKSEKUTIF - KELAS DATA ANALYTICS
TALK SHOW NGOTAK

Total Hadiah
IDR 78++
Juta

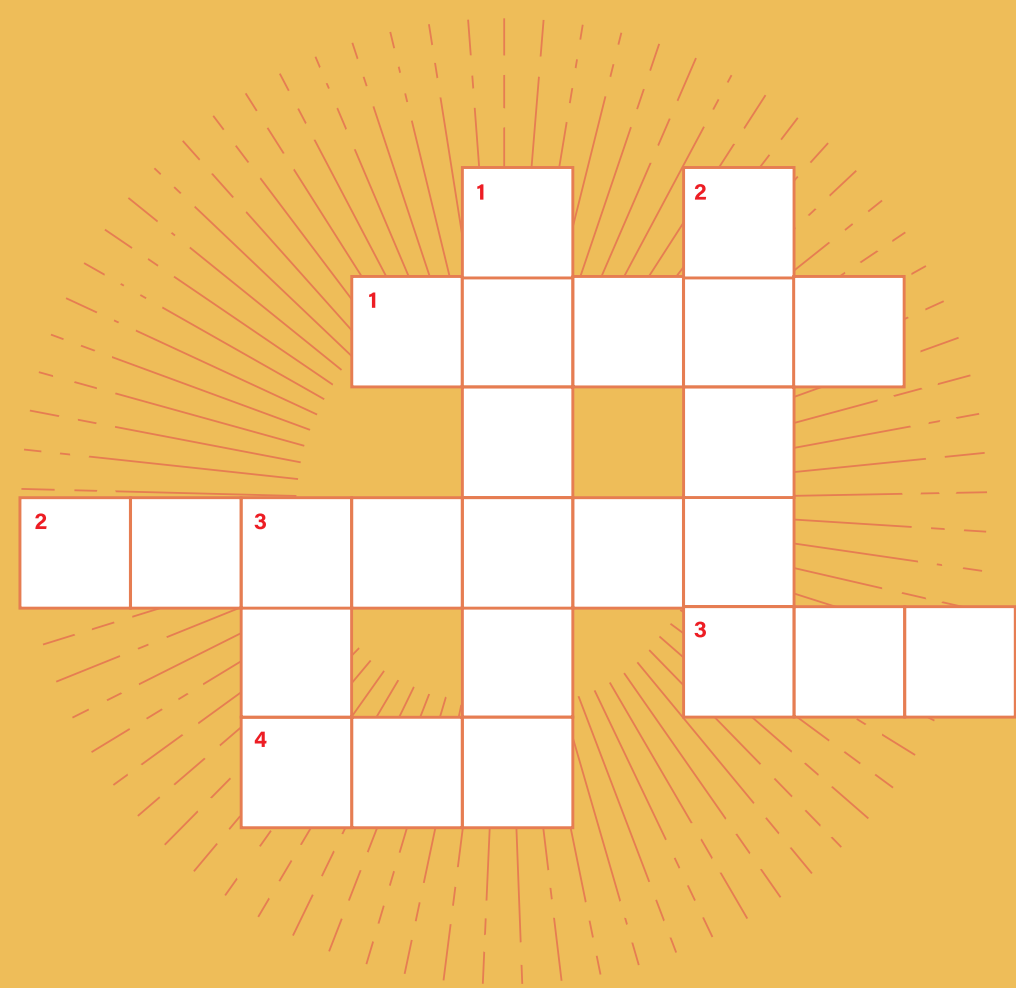
Organized by:



MoF-DAC
Ministry of Finance
Data Analytics Community



Sponsored by:
SMi
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)



Mendatar:

1. Kota pada rubrik Photostory
2. Sedih sekali, susah hati
3. Kantor pelayanan pajak
4. Harapan

Menurun:

1. Merek, brand
2. Sumber penerimaan hibah dan PNPB
3. Musik dari Jamaika, gabungan jazz dan unsur tradisional Karibia

Kirim jawaban Anda melalui story post instagram dengan tag IG @majalahmediakeuangan atau melalui email mediakeuangan@kemenkeu.go.id, sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi

Hari Emoji Sedunia

17 Juli 2021



Foto: iStock